

NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA PEMBERONTAKAN RAKYAT SUMATERA BARAT PADA AWAL TAHUN 1927

Ba'in

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Each incident in history contain high values that can be taken and utilized as the guidance for the next generation to be the guide for their life in the future. The history lesson will become really significant if each history teacher always invest the values of education from each kind of history material that is taught to the pupil. The West Sumatera riot revolt at the beginning of 1927 at least contain three values of education that that is good to be socialized to students, firstly, the disintegration of the West Sumatera community contain the value of the importance of the spirit of unity, secondly, authoritarianism the colonial Dutch government in undertaking his authority in West Sumatera contain the value of democracy of the importance of social, political, economic and cultural life, thirdly, tactics of Indonesian Communist Party in inciting the West Sumatera community to carry out the revolt show us the importance of the value of vigilance towards the disturbance and the threat to himself, the community, the nation.

Keywords:, values education, historical events, popular uprising

ABSTRAK

Setiap kejadian dalam sejarah mengandung nilai-nilai yang tinggi untuk diambil dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi generasi berikutnya sebagai panduan untuk hidup mereka di masa depan. Pelajaran sejarah akan menjadi benar-benar signifikan jika setiap guru sejarah selalu menanamkan nilai pendidikan dari materi sejarah yang diajarkan kepada murid. Pemberontakan rakyat di Sumatera Barat pada awal tahun 1927 setidaknya mengandung tiga nilai-nilai pendidikan yang yang baik sebagai bahan pelajaran dan internalisasi nilai murid-murid, pertama, disintegrasi masyarakat Sumatera Barat mengandung nilai pentingnya persatuan, dua, otoritarianisme pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan kekuasaannya di Sumatera Barat mengandung nilai pentingnya demokrasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, tiga, taktik PKI dalam menghasut masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan pemberontakan dapat sarat dengan nilai kewaspadaan terhadap gangguan dan ancaman terhadap dirinya, masyarakat, bangsa.

Kata Kunci:, nilai-nilai pendidikan, peristiwa sejarah, pemberontakan rakyat

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan suatu negara pada zaman modern ini pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Sebabnya adalah karena pendidikan merupakan wahana untuk

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Yusuf, 1985: 11). Karena itu, maka pendidikan di suatu negara pada hakekatnya adalah realisasi kebijaksanaan negara untuk meningkatkan warganya sebagai keseluruhan ke taraf kesejahteraan yang dicita-citakan.

Demikian pula kebijaksanaan pendidikan di Indonesia adalah juga dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang terdidik yang cocok dengan yang dibutuhkan serta memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap mental yang sesuai dengan Pancasila. Karena itu, pendidikan harus mampu mengembangkan potensi-potensi iman, cipta, rasa, karsa, karya dan hati nurani (*Suara Guru*, 1987: 87). Dengan kata lain pendidikan harus dapat membimbing sikap dan tingkah laku serta perbuatan manusia, sehingga menghasilkan manusia utuh dan berkualitas. Dalam hubungan ini pendidikan harus mampu mempertahankan dan meneruskan serta mengembangkan nilai-nilai positif untuk membentuk watak dan kepribadian anak didik (Santosa, 1980: vii).

Sejarah sebagai materi yang akan disajikan kepada anak didik pun harus mampu berperan dalam hal tersebut di atas. Dengan belajar sejarah anak didik diharapkan menjadi manusia yang bijak, arif dan bijaksana. Dari memahami dan menghayati peristiwa sejarah diharapkan anak didik akan mampu memetik manfaat dan nilai kesejarahannya untuk dijadikan pelajaran agar dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari dan mampu melanjutkan perjuangan demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sekadar sebagai gambaran, penulis dalam tulisan ini mencoba menggali nilai-nilai pendidikan dari terjadinya suatu peristiwa sejarah pada masa lampau. Peristiwa yang penulis jadikan sampel untuk menggali nilai-nilai pendidikan adalah pemberontakan rakyat di Sumatera Barat pada awal tahun 1927. Pengambilan sampel

peristiwa sejarah ini semata-mata didasarkan atas ketersediaan data, terutama data primer dan sekunder yang penulis miliki.

PEMBERONTAKAN RAKYAT SUMATERA BARAT PADA AWAL TAHUN 1927

Meletusnya pemberontakan rakyat Sumatera Barat pada awal tahun 1927 tidak terpisahkan dari serangkaian pemberontakan yang dilakukan PKI di Jawa pada akhir tahun 1926. Mulai tahun 1925 sampai tahun 1926 PKI terpecah yang disebabkan oleh dominannya komunis sayap kiri dalam membawa taktik perjuangan PKI (Effendi, 1950: 19). Oleh karena dorongan yang sangat kuat dari komunis sayap kiri jugalah, pada bulan November 1926 meletus pemberontakan di Batavia, Banten, Tangerang dan sekitarnya. Dalam hubungan ini, sebelum pemberontakan itu pecah, yakni pada bulan Juli - September 1926 pemberontakan telah diletup-letupkan oleh pemimpin-pemimpin PKI cabang Batavia yang kebanyakan berhaluan kiri.

Pada bulan Agustus 1926 Sukrominoto, pemimpin PKI cabang Batavia membentuk suatu komite yang disebut Komite Persiapan Republik Indonesia. Pada hakekatnya komite itu adalah sebuah komite yang merancang pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Komite baru ini diketuai oleh Baharudin Saleh. Bersamaan dengan itu beberapa orang PKI oleh komite dikirim ke daerah-daerah untuk memberitahukan rencana pemberontakan. Baharudin Saleh yang juga menjabat ketua komite mendapat tugas ke daerah Sumatera Barat (Benda & McVey, 1960: 158). Di Sumatera Barat Baharudin Saleh mendapat dukungan dari PKI anak cabang Padang dan Silungkang.

Pada tanggal 20 Desember 1926 telah berkumpul lebih dari 30 orang komunis di Silungkang. Mereka adalah pemimpin anak cabang Padang panjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar, dan Silungkang (Benda & McVey, 1960: 170). Dalam pertemuan itu tampil salah seorang yang bernama Komarudin, yang membakar semangat pemberontak. Komarudin sambil menggenggam senjata api berseru bahwa pemberontakan wajib dan harus dilakukan. Ia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah *jihad*, perang *fisabilillah* (McVey, 1965: 344). Akhirnya pertemuan tersebut memutuskan bahwa pemberontakan harus segera dilaksanakan, dan disepakati akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 1927.

Akan tetapi tampaknya pemerintah kolonial Belanda telah mencium rencana pemberontakan itu. Oleh karena itu sebelum pemberontakan pecah seperti yang direncanakan beberapa pemimpin komunis Sumatera Barat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 30 Desember 1926. Meskipun para pemimpin komunis Sumatera Barat telah ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, namun akhirnya pemberontakan meletus juga, dimana aksi ini dilakukan oleh kaum buruh tani yang jatuh miskin, para pedagang yang bangkrut, para buruh perkebunan dan kaum *bromocorah* serta guru-guru agama dari golongan muda (Wertheim, 1950: 146-150). Akan tetapi karena telah tidak ada koordinasi yang baik, maka aksi pemberontakan yang terjadipun tidaklah terarah.

Barisan pemberontak dari Taratak, Tarung Tarung dan Siaroaro yang dipimpin oleh Abdul Muluk bergerak ke Silungkang dengan kurang lebih 100 orang. Dengan bersenjata pisau, pedang dan granat mereka terus bergerak ke Sawah Lunto melalui Muara Talaban (Muluk, 1981: 101). Sementara itu ke-

satunya Muara Kalaban yang dipimpin Karim Maroko dan Muluk Chaniago memulai aksinya sebelum pukul 24.00 tengah malam dengan membom kantor polisi Muara Kalaban. Mendengar suara granat dan tembak menembak dari Muara Kalaban barisan Abdul Muluk menjadi panik. Beberapa waktu kemudian datang menghadang tiga buah mobil yang ternyata di dalamnya berisi polisi Belanda. Barisan Abdul Muluk sempat melakukan penyerangan terhadap polisi Belanda tersebut, tetapi akhirnya barisan Abdul Muluk berhasil dilumpuhkan polisi Belanda dan mereka semua ditawan.

Di Tanjung Ampalu pada tanggal 1 Januari 1927 terjadi aksi pembakaran rumah-rumah milik para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Aksi ini berlanjut dengan pemutusan jaringan-jaringan telepon. Tetapi tak lama kemudian aksi mereka berhasil dihentikan polisi Belanda dan menahan mereka agar tidak dapat bergerak ke Sawah Lunto. Di tempat lain, di Padang Sibusuk, para pemberontak membunuh kepala nagari dan beberapa orang penduduk setempat yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Kemudian mereka bergerak ke Sawah Lunto, tetapi sesampainya di Muara Kalaban mereka berhasil dicerai-beraikan oleh pasukan polisi Belanda. Akhirnya mereka terpecah menjadi dua, sebagian kembali ke Padang Sibusuk dan mengadakan pembunuhan-pembunuhan lagi, sebagian lainnya tetap berada di Muara Kalaban yang juga mengadakan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Mereka yang dipimpin Manaf ini pada tanggal 3 dan 4 Januari 1927 berhasil menghancurkan satu kompi pasukan Belanda, yang sedianya akan mengadakan pembersihan di Padang Sibusuk, Pamutan, dan Tanjung Ampalu. Barisan Manaf ini kemudian mem-

blokade jalan raya dari Sawah Lunto, Tanjung Ampalu sampai Solok (Benda & McVey, 1960: 176).

Di Silungkang, markas besar kaum pemberontak, terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap opsir-opsir Belanda dan beberapa guru agama serta tukang emas yang dianggap bekerja sama dengan Belanda (Muluk, 1981: 112). Di samping itu terjadi juga aksi-aksi pembakaran bangunan-bangunan milik orang-orang Belanda dan kaki tangannya. Pembunuhan juga terjadi di Padang terhadap reserse-reserse dan para pegawai pemerintah Belanda. Di Pariaman asisten Demang Sicincin dan beberapa orang reserse dibunuh oleh penduduk setempat. Sedangkan di Batu Sangkar terjadi demonstrasi yang menuntut penghapusan *rodi* dan kemerdekaan (Muluk, 1981: 117).

Keadaan Sumatera Barat yang demikian itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menyatakan keadaan gawat untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Sedangkan untuk mengatasi pemberontakan pemerintah kolonial Belanda mendatangkan serdadu-serdadu dari Jawa. Di Seluruh daerah-daerah di Sumatera Barat yang pemberontak semua laki-laki dan pemuda ditangkap oleh serdadu-serdadu Belanda. Operasi-operasi pembersihan itu bahkan dilakukan hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga dalam waktu tidak lebih dari lima hari pemberontakan tersebut dapat dipadamkan.

Dalam hubungannya dengan kasus pemberontakan di Sumatera Barat tersebut, pertanyaan pokok yang patut diajukan adalah mengapa rakyat Sumatera Barat pada awal tahun 1927 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda? Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut perlu dilihat keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Su-

matara Barat pada awal abad ke-20.

Proses sejarah Sumatera Barat pada awal abad ke-20 ditandai oleh dua hal, yaitu semakin berkembangnya paham pembaharuan Islam dan terjadinya perubahan kehidupan ekonomi masyarakat dari sistem ekonomi barter menjadi ekonomi uang. Semakin berkembangnya paham pembaharuan Islam pada masa itu dimungkinkan oleh semakin intensifnya hubungan antara Sumatera Barat dengan dunia luar, terutama Timur Tengah. Sedangkan terjadinya perubahan sistem ekonomi pada masa itu dimungkinkan oleh terjadinya arus modernisasi yang melanda masyarakat Sumatera Barat. Hal ini adalah sebagai salah satu akibat tidak langsung dari pelaksanaan politik etis di Sumatera Barat. Adalah suatu kebetulan historis bahwa berkembangnya gerakan pembaharuan Islam terjadi bersamaan dengan perubahan sistem ekonomi. Kedua gejala ini pada gilirannya satu sama lain saling menunjang.

Akibat sosial yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut di atas ialah semakin kuatnya individualisme dan melemahnya komunalisme. Dalam kaitan ini, terjadi proses individualisasi membawa konsekuensi kurang berfungsinya adat dan agama Islam sebagai pengikat sosial. Hal ini pada gilirannya menggoncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sumatera Barat dengan ditandai oleh terjadinya gejolak, kegelisahan serta ketidaktentuan dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi, dan politik. Keadaan demikian tumbuh pada saat hakekat hubungan kolonial bersifat subordinatif semakin disadari. Kesadaran demikian menaik sebagai akibat semakin tertekannya masyarakat Sumatera Barat oleh kewajiban membayar bermacam-macam pajak dalam bentuk uang, kerja paksa, dan bentuk-bentuk penindasan lainnya.

Sementara itu, sejalan dengan se-

makin derasnya arus modernisasi ke alam Sumatera Barat, di kalangan pembaharu Islam terdapat kecenderungan menaiknya usaha pencarian identitas baru dan dasar ideologi politik yang sesuai. Tetapi pada pihak lain pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan kebijaksanaan politik etisnya selalu berusaha membatasi ruang gerak golongan pembaharu Islam. Akibat dari itu semua adalah sikap benci dan perlawanan golongan pembaharu Islam, khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya terhadap pemerintah kolonial Belanda semakin tinggi dan memuncak. Pada akhirnya mereka hanya butuh satu tindakan, yakni aksi nyata melawan pemerintah kolonial Belanda dan kaki tanganya serta siapa saja yang dianggap sebagai musuh.

Dalam situasi masyarakat Sumatera Barat yang kacau dan tegang itulah pada tahun 1923 paham komunis dibawa dan disebar oleh Haji Datuk Batuah di Sumatera Barat. Datuk Batuah pertama-tama menyebarkan ajaran komunis di kalangan pelajar *Sumatera Thawalib* (Noer, 1982: 57). Lembaga *Sumatera Thawalib* adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat. Datuk Batuah sendiri adalah seorang guru di *Sumatera Thawalib* Padang Panjang, maka dengan mudah ia dapat menanamkan dan memperluas pengaruhnya di kalangan pelajar-pelajar Sumatera Thawalib. Sementara itu pada pertengahan tahun 1923 Nazar Zaenudin, seorang Minangkabau yang telah menerima pengaruh komunisme bergabung dengan Datuk Batuah di Padang Panjang. Mereka kemudian mendirikan Pusat Komunisme Islam (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977: 96).

Kedua tokoh komunis ini dalam menyebarkan komunisme di Sumatera Barat menggunakan *tabligh* dan pen-

erbitan. Datuk Batuah mendirikan harian Pemandangan Islam, dan Nazar Zaenudin menerbitkan harian *Djago Djago* (Benda & McVey, 1860: 101). Cara-cara ini seperti diketahui juga digunakan ulama-ulama Islam dalam menyebarkan paham pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Di samping itu mereka berdua mendirikan forum diskusi yang diberi nama Klub Debat Internasional. Forum diskusi ini banyak diikuti oleh pelajar-pelajar dan guru-guru muda *Sumatera Thawalib*. Dalam forum ini Datuk Batuah mengajarkan dan mendiskusikan ide-ide yang memungkinkan kombinasi antara sikap antikafir, Belanda dengan ajaran komunis mengenai kemiskinan, sehingga secara tidak dirasakan paham komunis telah merasuki cara berpikir pelajar-pelajar Sumatera Thawalib.

Paham komunis yang telah mempengaruhi beberapa pelajar Sumatera Thawalib itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik di Sumatera Barat, sebab pelajar-pelajar *Sumatera Thawalib* yang telah terpengaruh paham komunis setelah lulus ikut menyebarkan ide komunis di daerahnya masing-masing. Penyebaran ini terutama mereka lakukan di kalangan para petani (Schrieke, 1960: 86). Oleh karenanya paham komunis akhirnya tersebar ke berbagai daerah di Sumatera Barat.

Pada tanggal 11 November 1923 Datuk Batuah dan Nazar Zaenudin ditangkap pemerintah kolonial Belanda, pucuk pimpinan komunis Sumatera Barat diambil alih oleh Sutan Said Ali dan pusat komunisme Sumatera Barat berpindah ke Padang. Said Ali melakukan propaganda-propaganda komunis di antara para pedagang, buruh-buruh perkebunan dan pegawai jawatan kereta api. Sementara itu di kalangan pelajar-pelajar *Sumatera Thawalib* dan guru-guru mudanya, propaganda komunis terus

diintensifkan.

Dalam melakukan propaganda orang-orang PKI tidak segan-segan menggunakan kepercayaan rakyat kepada ramalan ratu adil. Demikian pula para pemimpin komunis tidak segan-segan mensafsir ayat-ayat suci Al Quran dan hadis nabi guna mengambil hati rakyat. Cara-cara propaganda yang demikian ini, sering dilakukan oleh Haji Nur Ibrahim, Haji Baharudin dan tokoh-tokoh komunis Sumatera Barat lainnya. Masyarakat Sumatera Barat yang telah menerima paham komunis menyebut ajaran tersebut "ilmu komunis" (Schrieke, 1960: 155). Ilmu ini menyatukan ajaran Islam dan ide anti penjajahan Belanda, anti imperialisme, anti kapitalisme dari ajaran Marxis.

Dalam hal itu kebencian rakyat Sumatera Barat yang telah menumpuk-numpuk kepada pemerintah kolonial Belanda mereka salurkan melalui ide-ide tersebut. Agaknya mereka terpicu oleh propaganda orang-orang komunis yang selalu menjajikan kehidupan yang lebih baik pada masa datang. Mereka yakin bahwa kaum kafir, kapitalisme besar, imperialis rakus, hanya dapat dilenyapkan dengan kemerdekaan. Mereka pun yakin bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang telah digariskan oleh orang-orang komunis. Begitulah kegelisahan dan ketidaktentuan serta kesengsaraan rakyat dipergunakan orang-orang komunis untuk menghasut rakyat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DARI REVOLUSI SOSIAL DI SUMATERA BARAT PADA AWAL TAHUN 1927

Adalah sukar untuk menilai pemberontakan di Sumatera Barat pada awal tahun 1927 sebagai suatu peristiwa

yang dapat dibanggakan dalam sejarah nasional Indonesia. Sebaliknya, sebagai akibat dari pemberontakan itu dalam tahun-tahun sesudahnya pergerakan nasional Indonesia mengalami penindasan yang luar biasa, sehingga sama sekali tidak dapat bergerak (Kartodirdjo, dkk, 1979: 213). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Hatta bahwa akibat dari petualangan PKI tahun 1926-1927 itu, tidak hanya PKI yang ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga organisasi yang lain. Berangkat dari kenyataan inilah yang boleh dikatakan bahwa pemberontakan itu telah merugikan pergerakan nasional hendak diambil nilai-nilai pendidikannya.

Terjadinya Disintegrasi Sosial Masyarakat Sumatera Barat Awal Abad 20

Sebagaimana diketahui salah satu faktor penyebab terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat awal tahun 1927 adalah terjadinya disintegrasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat. Keadaan demikian menimbulkan perpecahan masyarakat Sumatera Barat menjadi berbagai golongan yang saling bertentangan dan saling mencurigai (Abdullah, 1987: 106). Di samping itu, antara golongan satu dan golongan lainnya menaruh sikap saling benci dan dendam dan sewaktu-waktu bila ada kesempatan dapat muncul dalam bentuk penganiayaan dan pergolakan. Keadaan masyarakat seperti itulah yang kemudian dimanfaatkan PKI untuk mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat agar semakin membenci pemerintah kolonial Belanda dan mengobarkan api perlawanan. Padahal itu semua adalah demi tujuan PKI semata-mata, dan masyarakat Sumatera Barat hanya dipakai sebagai alat untuk mencapai

tujuannya. Hal ini tentunya dapat memberikan pelajaran pada anak didik bahwa bagaimanapun persatuan dan kesatuan haruslah ditegakkan agar tidak mudah dipengaruhi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Persatuan dan kesatuan adalah merupakan sarana yang sangat penting dalam segala situasi dan kondisi. Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia persatuan dan kesatuan pun memegang peranan vital dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Perpecahan hanyalah akan mendatangkan malapetaka bagi bangsa Indonesia sendiri. Ini terbukti dengan keadaan masyarakat Sumatera Barat pada awal abad ke-20, yang karena terjadi perpecahan di dalamnya maka mudah dibujuk PKI, sehingga terjadi pemberontakan di daerah tersebut yang sama sekali tidak dapat dibanggakan dalam sejarah nasional Indonesia. Apalagi dalam alam pembangunan dewasa ini, persatuan dan kesatuan bangsa mutlak diperlukan. Karenanya, jika ingin membawa bangsa dan negara Indonesia pada kemajuan maka pertama-tama bangsa Indonesia harus bersatu. Sukar untuk diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar jika warga negara pecah berantakan dan saling bermusuhan, sebab pada hakekatnya persatuan dan kesatuan adalah jiwa dan perekat pembangunan nasional. Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa itu dengan sendirinya haruslah menyentuh berbagai bidang kehidupan kebangsaan, antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pola pertahanan keamanan negara. Demikian juga persatuan dan kesatuan bangsa harus menyangkut segenap rakyat di seluruh tumpah darah Indonesia.

Di samping itu, perlu pula ditanamkan kepada anak didik bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indone-

sia tidaklah dilandasi pada konotasi etnis, melainkan justru menemukan titik tolaknya di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab (Analisa, 1985: 798). Itulah sebabnya konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak menerima secara konseptual pengertian mayoritas dan minoritas, pengertian tentang adanya warga kelas satu dan kelas dua, melainkan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Dalam pada itu, dalam ruang lingkup lebih kecil di dalam kelas anak didik perlu didik agar bersatu dengan teman-temannya. Dengan persatuan kelas itu mereka akan dapat menerima pelajaran dengan baik, lain halnya jika kelas itu tidak bersatu di antara anak didik saling membenci dan saling bermusuhan, maka kelas itu tidak bisa tenang dan tentram sehingga sukar bagi anak didik untuk dapat belajar dengan baik sebab anak didik senantiasa selalu merasa terancam.

Sikap Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Rakyat Sumtara Barat

Kira-kira sejak tahun 1901 pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik kolonial dengan apa yang sering dikenal dengan nama politik etis. Jika ditilik dari teori, kebijaksanaan itu setidak-tidaknya membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia, namun kenyataannya pelaksanaan politik etis itu di Sumatera Barat tidaklah lebih hanya terasa pada mengalirnya modal asing ke daerah tersebut. Memang pada hakekatnya pencanangan politik etis adalah sebagai akibat kemenangan kaum modal Belanda dalam mempengaruhi politik kolonial di Hindia Belanda. Dengan demikian mudah dimengerti jika pemerintah kolonial Belanda tetap mengabaikan aspirasi-aspirasi rakyat Sumatera

Barat pada waktu itu (Mansur, dkk., 1970: 181). Terlebih lagi, sehubungan dengan berkembangnya paham pembaharuan Islam di daerah itu, maka pemerintah kolonial Belanda semakin memperkuat tekanannya terhadap rakyat Sumatera Barat. Hubungan penguasa dengan rakyat yang demikian itu jelas sukar dijumpai suasana demokratis. Padahal sebagaimana diketahui negara yang tidak demokratis betapapun tidak secara pasti, akan dimusuhi rakyatnya dan rakyat berusaha menumbangkan pemerintahan tersebut.

Tidak adanya suasana demokratis dalam hubungan pemerintahan kolonial Belanda dengan rakyatnya di Sumatera Barat pada waktu itu tampak jelas pada dibatasinya para pembaharu Islam bergerak dalam bidang politik. Dengan demikian rakyat ada yang dikurangi bahkan dihilangkan hak-haknya. Mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam bidang politik, suatu hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan demokratis.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini mencakup antara lain seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan dan sebagainya (Budiardjo, 1995: 1-3). Di samping itu demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Karena itulah nilai-nilai demokrasi kiranya perlu ditanamkan kepada anak didik.

Dalam konsep demokrasi tersirat beberapa nilai yang sangat baik untuk dimiliki anak didik. Dalam kaitan ini di sini disebutkan nilai-nilai demokrasi

yang dapat ditanamkan kepada anak didik. *Pertama*, menyelesaikan perselisihan secara damai dan dengan melem-baga. Penyelesaian perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha mencapai kompromi, konsensus atau mu-fakat. *Kedua*, menjamin terselenggara-nya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang memod-ernisasikan diri terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti misalnya majunya teknologi, pe-rubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, pola perdagan-gan, dan sebagainya. Dalam hal ini pe-merintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perubahan-perubahan itu dan secepat mungkin mengendalikannya. *Ketiga*, menyeleng-garkan pergantian pemimpin secara teratur. *Keempat*, membatasi peng-gunaan kekerasan sampai minimum. *Kelima*, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman penda-pat, kepentingan serta tingkah laku. Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab disamping keanekaragaman diperlukan pula persatuan serta integrasi. Keenam, menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi tersebut hendaklah dapat dinternalisasikan dalam kehidupan anak didik sehari-hari. Dengan demikian anak didik akan memiliki rasa percaya diri dan mampu bereksistensi. Anak didik merasa punya hak serta kewajiban yang seimbang, serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan un-tuk kepentingan bersama. Lebih dari itu, di dalam proses belajar mengajar anak didik merasa tidak hanya menjadi objek, tetapi harus merasa menjadi sub-jek (Freire, 1985: 78-80). Di samping itu dengan dihayati dan diinternalisasi-kannya nilai-nilai demokrasi, ia akan

merasa bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, baik terhadap guru maupun temannya. Kecuali itu, anak didik akan selalu mawas diri dan sadar akan keberadaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga ia akan merasa bertanggungjawab untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah-masalah sosial di dalam masyarakatnya.

Taktik-Taktik PKI dalam Mempengaruhi Masyarakat Sumatera Barat

Dari kejadian-kejadian di Sumatera Barat pada awal abad ke-20 dapat diketahui bahwa komunisme sangat pandai memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada dalam suatu masyarakat. Sesuai dengan prinsip dialektika, komunis akan menyesuaikan diri cara atau taktiknya menuju kemenangannya (*Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 1988). Dalam hal ini jika dipandang perlu komunis rela mengorbankan nama komunisme atau simbol-simbol komunisme, tetapi tahu-tahu komunisme sudah menyusup ke dalam masyarakat. Hal demikian itulah sebenarnya yang pernah terjadi di lembaga pendidikan *Sumatera Thawalib* pada tahun 1923. Karena itulah, pada dewasa ini harus waspada terhadap bahaya komunisme yang mampu memanfaatkan berbagai macam kondisi dan situasi. Lebih dari itu, harus mampu berusaha semaksimal mungkin untuk meniadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan komunisme.

Dalam kenyataannya, pergolakan sosial yang melanda masyarakat Sumatera Barat pada waktu itu dengan berbagai latar belakangnya, selain dalam bentuk krisis kepemimpinan, krisis politik tetapi juga telah diikuti krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjan-

gan yang menimbulkan kegoncangan masyarakat, terbukti merupakan lahan yang subur bagi kegiatan orang-orang komunis. Tampak bahwa pada kondisi dan situasi seperti itulah PKI melakukan berbagai tindakan eksploitasi untuk kepentingan politiknya, terutama dalam rangka menggalang kekuatan (*Sinar Harapan*, 5 Mei 1975).

Dalam hubungan ini, berbagai cara ditempuh orang-orang komunis guna mencapai tujuan golongannya. Mereka dekati rakyat dengan cara persuasif, mempengaruhi rakyat lewat media massa, mengadakan kursus-kursus, menyebarkan surat-surat selebaran, pamflet-pamflet hingga mengadakan tindakan intimidasi dan agitasi di kalangan rakyat ditempuh PKI (Schrieke, 1960: 198). Taktik-taktik demikian pun tentunya sampai sekarang masih dilakukan orang-orang PKI walaupun dengan sembunyi-sembunyi dan tentunya lebih canggih.

Karena itulah nilai kewaspadaan, terutama kewaspadaan terhadap komunisme haruslah selalu ditanamkan kepada anak didik. Dalam menanamkan nilai-nilai kewaspadaan ini, pelajaran sejarah terang memiliki peranan yang amat penting. Memang gerakan komunisme di Indonesia sekarang ini telah dilarang, namun bukan merupakan suatu hal yang mustahil jika suatu saat muncul ke permukaan kembali, melakukan kudeta untuk menghancurkan negara Pancasila. Dari sejarah diketahui bahwa komunis tidak pernah mengenal putus asa. Setelah gagal melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927, gerakan komunis dinyatakan terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda, dan baru setelah Indonesia merdeka bangkit lagi. Namun baru beberapa tahun dari kebangkitannya itu mereka mampu menggalang kekuatan cukup kuat, sehingga pada tahun 1948 mereka mengadakan gerakan kontra revolusioner

dengan tujuan mendirikan negara komunis Indonesia (Benedick, 1977: 27). Demikian pula dengan kegagalannya tahun 1948, ternyata mereka pun bangkit kembali bahkan dengan kekuatan yang lebih besar akan melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1965 (Alfian, 1985: 78).

Kewaspadaan tidak hanya ditujukan kepada kebangkitan komunisme atau orang-orang yang berhaluan kiri lainnya, akan tetapi juga kepada paham-paham dan pihak-pihak lain yang berusaha merubuhkan NKRI. Untuk membendung paham-paham dan pihak-pihak yang anti NKRI tersebut, maka haruslah ditegakkan keadilan, meniadakan ketimpangan sosial, memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, serta penyelewengan-penyelewengan dalam berbagai ragam bentuk dan corak manifestasinya. Di samping itu harus pula diikuti usaha-usaha mengikis segala macam bentuk kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Dengan demikian komunisme akan dapat dilumpuhkan sebelum mereka tumbuh. Karena itulah sejak dini anak didik harus dididik agar dapat berkata dan berlaku adil, benar dan bertanggung jawab, saling mengerti dan toleran antar teman, antar anak didik dan pendidik. Haruslah pula ditanamkan pada anak didik nilai-nilai tersebut di atas dengan jalan memberi suri tauladan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan sedapat mungkin menghindari tindakan tercela (Basis, 1987: 363).

SIMPULAN

Setelah dikaji lebih jauh dan dalam ternyata apa yang berkaitan dengan terjadinya pemberontakan rakyat Sumatera Barat pada awal tahun 1927 mengandung nilai-nilai pendidikan

yang sangat bermanfaat untuk ditanamkan pada anak didik. Sekurangnya ada tiga nilai yang dapat diperoleh dari mengkaji peristiwa sejarah pemberontakan rakyat Sumatera Barat pada awal tahun 1927, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, nilai demokrasi, dan nilai kewaspadaan. Nilai persatuan dan kesatuan mengandung sifat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, kerja sama, gotong royong dan lain sebagainya. Jika anak didik telah dapat mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka mereka akan dapat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongannya, ikut membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan, dan menjunjung tinggi serta ikut mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya, mereka akan menjadi warga negara yang potensial untuk menjadi modal pembangunan di Indonesia. Demikian pula nilai demokrasi, mengandung dalam dirinya sifat terbuka, adil, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan mawas diri serta sadar akan keberadaannya sebagai bagian inheren dari masyarakat. Melalui kedua nilai tersebut anak didik akan rela berkorban tanpa pamrih demi bangsa dan negaranya, berjuang tanpa putus asa, dinamis untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia, bersatu untuk melaksanakan dinamika pembangunan. Sedangkan nilai kewaspadaan, anak didik akan mampu untuk sedini mungkin mencurigai hal-hal yang mengancam kelestarian Pancasila, melawan gerakan-gerakan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kemuliaan serta menolak segala bentuk penyelewengan dan tindakan-tindakan tercela lainnya. Karenanya, mereka akan sanggup mempedomani, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari serta rela berkorban demi menjaga keutuhan wilayah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alfian. 1985. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Analisa*, No 7 Juli 1985.
- Basis*, No. 10 Oktober 1987.
- Benedick, Anderson, R.O.G. 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Benda, H.J. & Ruth McVey. 1960. *The Comunist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia, Key Documents*. Ithaca: Cornell University Press.
- Budiardjo, Miriam. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Rustam. 1950. *Trotskyisme*. Jakarta: Patriot.
- Freire, Paulo. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1979. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Dep. P & K.
- Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 1988.
- Mansur, M.D., dkk. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhatara.
- McVey, Ruth. 1965. *The Rise of Indonesia Comunist*. Ithaca: Cornell University Press.
- Muluk, Abdul Nasution. 1981. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Jakarta: Mutiara.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*. Jakarta: LP3ES.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Dep. P & K.
- Santosa, Iman Slamet. 1980. *Pembinaan Watak Tugas Utama Pendidikan*. Jakarta: UI Press.
- Sinar Harapan*, 5 Mei 1975
- Suara Guru*, No. 4 April 1987.
- Schrieke, B.J.O. 1960. *Indonesian Sociological Studies*, Part. I. Bandung: Sumur Bandung.
- Wrethheim, W.F. 1950. *Effects of Western Civilization on Indonesia Society*. New York: NY University Press.
- Yusuf, Maftuchak, dkk. 1985. *Program Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PS IKIP Jakarta - BKKBN.